Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 518-524
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18338723

Reformasi Birokrasi: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik

Leni Rohida[1*], Adinda[2]
[1,2]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati-Cirebon
[*]Email korespondesi: leni.rohida@ugj.ac.id

Abstrak

Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir implementasi reformasi birokrasi di tingkat daerah menunjukkan bahwa penataan kelembagaan pemerintahan masih memerlukan perbaikan signifikan sehingga dibutuhkan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam optimalisasi kinerja pelayanan publik di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Metode empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, pembacaan data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan. Kerangka teoritis merujuk pada teori kebijakan publik dengan konsep optimalisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sirigoringo (2005) meliputi unsur tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat capaian tertentu dalam pelaksanaan pelayanan, masih terdapat indikator yang memerlukan optimalisasi, khususnya pada aspek sumber daya yang membatasi. Kondisi tersebut tampak melalui keluhan sebagian masyarakat Desa Buyut mengenai minimnya fasilitas, sarana, dan prasarana pelayanan yang memadai untuk mendukung aktivitas pelayanan pemerintah desa kepada warga. Berdasarkan temuan tersebut, upaya mengoptimalkan reformasi birokrasi di tingkat desa seyogianya memperhatikan pemenuhan fasilitas, sarana, dan prasarana pendukung sebelum kebijakan reformasi birokrasi diimplementasikan.
Kata kunci: *Kinerja Pelayanan, Optimalisasi, Reformasi Birokrasi*

Abstract

Bureaucratic reform is an effort involving renewal and fundamental changes to the system of governance aimed at creating administration that is more effective, efficient, transparent, and oriented toward public service. However, in recent years, the implementation of bureaucratic reform at the local level has indicated that the institutional arrangement of government still requires significant improvement, thus necessitating a shift in the paradigm of governance. This study aims to identify the implementation of bureaucratic reform in optimizing public service performance in Buyut Village, Gunung Jati Subdistrict, Cirebon Regency. This research employs a descriptive empirical method with a qualitative approach. Data analysis was conducted through data reduction, systematic data review, and conclusion drawing. The theoretical framework refers to public policy theory using the concept of optimization as proposed by Sirigoringo (2005), which includes elements of objectives, decision alternatives, and constraining resources. The findings reveal that public service performance in Buyut Village, Gunung Jati Subdistrict, Cirebon Regency has not yet been optimal. Although certain achievements have been attained in service delivery, several indicators still require optimization, particularly in terms of constraining resources. This condition is reflected in complaints from some residents of Buyut Village regarding the lack of adequate facilities, infrastructure, and service-supporting amenities to support the village government's service activities. Based on these findings, efforts to optimize bureaucratic reform at the village level should prioritize the provision of adequate facilities, infrastructure, and supporting resources prior to the implementation of bureaucratic reform policies.
Keywords: *Service Performance; Optimization; Bureaucratic Reform*

Article Info
Received date: 12 January 2026 Revised date: 17 January 2026 Accepted date: 22 January 2026

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Menurut Sedarmayanti (2009), reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien dan akuntabilitas (Febriant Rizaldy et al., 2024). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terdapat misi reformasi birokrasi di Indonesia yang memuat pasal-pasal mengatur tentang peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Dengan sederhana, birokrasi dapat diartikan sebagai perangkat negara. Namun, dalam prakteknya, birokrasi juga merupakan entitas atau sektor pemerintahan yang meliputi baik lembaga maupun individu yang mendapatkan pendapatan dari APBN/APBD. Birokrasi pemerintah sering kali menjadi sorotan utama terkait isu-isu penanganan korupsi, yang membutuhkan usaha-usaha serius dari pihak pemerintah. Mengingat birokrasi merupakan alat yang krusial bagi masyarakat, maka misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diperjuangkan untuk mereka (Yusriadi, 2018)

Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai strategi membangun aparatur dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Febriant Rizaldy et al., 2024). Sejak dimulainya era reformasi, reformasi birokrasi pemerintahan telah dicanangkan, namun realisasinya mengalami berbagai hambatan dan keterlambatan. Perubahan dalam perilaku birokrasi belum terlihat menuju perbaikan, dan jumlah pejabat atau birokrat yang terlibat dalam korupsi semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat, baik di pusat maupun daerah, masih belum optimal meskipun prinsip desentralisasi telah diterapkan. Program-program untuk mencapai reformasi birokrasi telah disiapkan, tetapi banyak Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik belum mampu melaksanakannya dengan baik (Titin Rohayatin, 2018). Capaian reformasi birokrasi dalam beberapa tahun terakhir ini yang telah membuat landasan untuk penataan birokrasi ternyata masih perlu banyak melakukan perbaikan sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma pemerintahan (Hardiyanto Rahman, 2022). Birokrasi yang cenderung kurang efektif dan efisien, juga pegawai yang sangat banyak menyebabkan lambannya menjalankan tugas sehingga masih muncul stigma buruk di masyarakat (Afaq Ahmed et al., 2017).

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan (Delpiero Roring et al., n.d.).Dalam hal ini belum optimalnya upaya dalam reformasi birokrasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pola pikir dan komitmen pimpinan. Pola pikir yang belum menempatkan diri sebagai pelayan publik dan bertindak seperti penguasa yang mengakibatkan pelayanan publik menjadi lambat, prosedur yang berbelit dan budaya afiliasi menyebabkan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kinerja pelayanan merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi, tetapi bahkan dapat melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk kecepatan layanan, akurasi, kualitas, dan tingkat kepuasan pelanggan. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon adalah kelambanan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya pelayanan yang baik di tingkat bawah dan menurunnya sumber daya manusia. Faktor lain seperti perangkat elektronik juga dapat menghambat kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Desa Buyut tersebut kurang efektif, efisien, dan kurang terlaksana dengan baik, padahal pekerjaan publik yang utama dapat ditentukan oleh prosedur dan produk yang digunakan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi tersebut, perlu dilakukan

optimalisasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengutamakan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan permasalahan yang ada, bagaimana optimalisasi kebijakan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon? dan bagaimana hambatan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi kebijakan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui faktor penghambat reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi para praktisi khususnya di bidang pemerintahan dan stakeholder yang berkontribusi pada pelayanan publik di Indonesia agar dapat mengoptimalkan reformasi birokrasi terhadap kinerja pelayanan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti lain telah melalukan sejumlah penelitian serupa. Seperti penelitian milik (Furay & Mustofa, n.d.) dengan judul Analisis Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaima. Dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan hasil bahwa penerapan strategi dalam peningkatan kinerja pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaima Provinsi Papua Barat terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendukung yang sangat memperngarugi keefektifan penerapan tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan kondisi internal dam eksternal. Kondisi internal yaitu kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sedangkan kondisi eksternal yaitu peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Thraets*) untuk mengetahui strategi yang tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kaimana. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan fokus penelitian dan juga perbedaan teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana penelitian ini lebih berfokus membahas tentang "optimalisasi reformasi birokrasi terhadap kinerja pelayanan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon" dengan menggunakan teori kebijakan publik dengan konsep optimalisasi dari Sirigoringo (2005).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan di Desa Buyut dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan publik. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin memahami fenomena yang terjadi secara alamiah dari perspektif informan, tanpa manipulasi atau perlakuan khusus.

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik. Data kualitatif dapat berupa hasil wawancara, data di lapangan, dan bahan-bahan lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, serta dilengkapi dengan prosedur triangulasi data untuk memastikan keabsahan data melalui pendekatan yang beragam.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metode ini mencakup berbagai pendekatan, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik lainnya, yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik data yang ingin dikumpulkan. Untuk membantu penulisan paper ini, penulis penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data. Subyek yang bersedia menyumbangkan data dan mempunyai banyak informasi relevan mengenai permasalahan yang diteliti dipilih sebagai informan. Informan yang peneliti gunakan; **pertama** kepala Desa Buyut; dan yang **kedua** informan pendukung

yaitu perangkat desa dan masyarakat Desa Buyut. Data primer dan sekunder merupakan dua kategori yang sumber datanya terpisah.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti memperoleh sumber data dari narasumber yang kredibel dan dapat digali informasinya secara mendalam. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk merespons secara fleksibel serta memberikan interpertasi terhadap fenomena yang muncul seiring proses penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh deskripsi yang akurat dan mendetail mengenai data serta informasi yang dibutuhkan, sehingga tetap sesuai dengan fakta yang ada dan bukan sekadar hasil rekayasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai Optimalisasi Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pelayanan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi reformasi birokrasi kinerja pelayanan dan menggunakan teori kebijakan publik dari Siringoringo (2005) sebagai alat analisis, yang menghasilkan temuan sebagai berikut:

Tujuan : Siringoringo (2005) mengemukakan bahwa tujuan dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu maksimalisasi dan minimalisasi. Maksimalisasi digunakan ketika tujuan pengoptimalan suatu aktivitas terkait dengan manfaat, dampak, keuntungan, dan aspek lainnya (Ningsih & Hadi, 2022). Di sisi lain, minimalisasi diterapkan ketika tujuan pengoptimalan suatu aktivitas atau tindakan berhubungan dengan kendala, permasalahan, biaya, dan hal-hal yang sejenis. Dalam konteks ini, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut dapat diidentifikasi melalui kesesuaian antara hasil yang dicapai dan indikator tujuan yang telah diukur oleh Siringoringo (2005). Indikator yang digunakan oleh Siringoringo (2005) menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut telah dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari upaya maksimalisasi yang dilakukan dengan konsisten dalam melaksanakan aktivitas pelayanan. Selain itu, hal ini ditandai oleh keselarasan antara masalah yang dihadapi, jenis kinerja pelayanan yang dilaksanakan, serta kesesuaian dengan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, berbagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Desa Buyut secara konsisten mencakup kinerja pelayanan yang diberikan saat masyarakat datang untuk mendapatkan pendampingan dan arahan dalam proses pelayanan. Selain itu, desa mengembangkan sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah menyampaikan keluhan atau memberikan masukan mengenai pelayanan yang mereka terima. Tanggapan yang cepat terhadap pengaduan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan. Dengan demikian, berbagai bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Desa Buyut selaras dengan tujuan reformasi birokrasi.

Dalam upaya meminimalkan masalah yang dihadapi masyarakat selama proses pelayanan, bentuk minimalisasi ini berfokus pada penyelesaian isu-isu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu permasalahan yang teridentifikasi adalah bahwa Reformasi Birokrasi dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut. Berdasarkan analisis temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk maksimalisasi dan minimalisasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Desa Buyut telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya konsisten yang dilakukan oleh desa dalam berbagai aktivitas serta upaya untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui perancangan kinerja program-program yang telah dilaksanakan selama proses pelayanan.

Alternatif Keputusan : Alternatif Keputusan berfungsi sebagai indikator dalam konsep optimalisasi kebijakan publik yang berkaitan dengan dampak yang dihasilkan secara maksimal.

Alternatif Keputusan ini tentunya berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas dan harus dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian, Alternatif Keputusan merujuk pada serangkaian aktivitas atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, indikator alternatif keputusan dijelaskan melalui nilai efektivitas dan efisiensi yang terjalin dalam kolaborasi. Berdasarkan data yang diperoleh, kinerja yang dilakukan oleh Desa Buyut dapat dinyatakan efektif dan telah mencapai target yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari usaha yang dilakukan oleh desa untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut, dengan menekankan kinerja sebagai fokus utama, sehingga menciptakan kepercayaan dan kepuasan di kalangan masyarakat. Ini merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam hal kinerja dan pelaksanaan aktivitas pelayanan secara efektif.

Efisiensi dapat diukur melalui pelaksanaan kinerja pelayanan yang berlangsung. Sebagai pelaksana reformasi birokrasi, Desa Buyut melaksanakan berbagai aktivitas yang efisien, salah satunya adalah penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi. Hal ini memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas layanan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Berdasarkan analisis terhadap data yang ada, dapat disimpulkan bahwa indikator alternatif keputusan telah beroperasi secara optimal. Ini terlihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kelurahan sebagai pelaksana kinerja pelayanan yang berlangsung dengan efektif dan efisien.

Sumber Daya yang Membatasi : Indikator sumber daya dalam proses optimalisasi merujuk pada nilai potensial yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari aktivitas yang dilaksanakan. Karena ketersediaan sumber daya ini terbatas, keterlibatannya sangat penting dalam proses optimalisasi bagi para pelaksana. Ketersediaan sumber daya akan menjadi indikator keberhasilan yang dicapai, yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta sumber daya untuk pengawasan. Dari data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa Desa Buyut sebagai pelaksana reformasi birokrasi telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan proses pelayanan. Namun, pada kenyataannya, latar belakang pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman seseorang ketika menghadapi berbagai tantangan masyarakat dalam memberikan pelayanan di desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam reformasi birokrasi di Desa Buyut belum sepenuhnya beroperasi dengan optimal atau mencapai tingkat maksimal.

Dalam analisis sumber daya penunjang, dapat disimpulkan bahwa Desa Buyut masih memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan. Hal ini terlihat dari minimnya teknologi seperti proyektor, komputer, dan LCD proyektor. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa penggunaannya belum maksimal, dan beberapa fasilitas seperti ruang pertemuan serta area terbuka di sekitar kantor desa juga belum dimanfaatkan secara optimal.

Di samping itu, dari perspektif sumber daya pendukung, dapat dilihat bahwa aspek ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal terkait dengan indikator sumber daya yang membatasi. Pengawasan yang dilakukan selama kebijakan ini berjalan dianggap masih terbatas, sehingga perlu dilakukan evaluasi kontrol terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan mutu kinerja pelayanan di Desa Buyut. Aspek sumber daya pendukung memang memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan, aspek sumber daya pendukung harus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih efisien.

Berdasarkan analisis hasil temuan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya yang ada saat ini belum berfungsi secara optimal. Diperlukan peningkatan dalam aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan melalui pembekalan atau seleksi yang intensif, sesuai dengan dasar dan keterampilan pegawai desa. Selain itu, dari segi sumber daya penunjang, penting

untuk memperhatikan fasilitas, sarana, dan prasarana sebelum kebijakan ini diimplementasikan, karena tanpa hal tersebut reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan efektif. Demikian pula dalam aspek sumber daya pendukung, sebelum program dilaksanakan sebaiknya dibentuk tim pengawas oleh pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Pihak terkait yang dimaksud adalah Pemerintah Kota, yang tentunya memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai evaluasi proses pelayanan di pemerintahan.

Hambatan - hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut berasal dari kurangnya pengawasan dan sosialisasi mengenai kebijakan yang diterapkan. Bapak Wandi, selaku Kuwu Desa Buyut, mengungkapkan bahwa hal ini tercermin dari sedikitnya upaya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terutama oleh Pemerintah Kota, selama kebijakan reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa yang terlibat dalam upaya reformasi birokrasi, terungkap bahwa pegawai desa belum sepenuhnya mengoptimalkan sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas pelayanan. Sumber daya manusia ini dapat dikategorikan berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mereka ketika berhadapan dengan berbagai permasalahan masyarakat dalam memberikan pelayanan di kelurahan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Buyut mengeluhkan minimnya fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pihak desa kepada warga Desa Buyut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa lambatnya pelayanan publik di Desa Buyut disebabkan oleh rendahnya mutu layanan di tingkat dasar, penurunan kualitas sumber daya manusia, serta masalah pada perangkat elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dengan fokus pada penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Desa Buyut telah mengoptimalisasi kebijakan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut dengan melakukan prosesnya 3 tahap, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Berdasarkan optimalisasi reformasi birokrasi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan di Desa Buyut Kecamatan gunung Jati Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat aspek yang masih memerlukan optimalisasi, terutama pada indikator sumber daya yang membatasi. Pada indikator sumber daya yang membatasi, terdapat sumber daya manusia yang terlibat dalam reformasi birokrasi di Desa Buyut belum sepenuhnya beroperasi dengan optimal atau mencapai tingkat maksimal. Selain itu, dari segi sumber daya penunjang, Desa Buyut masih memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan. Demikian pula dalam aspek sumber daya pendukung, pengawasan yang dilakukan selama kebijakan ini berjalan dianggap masih terbatas.

Diperlukan peningkatan dalam aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan melalui pembekalan atau seleksi yang intensif, sesuai dengan dasar dan keterampilan pegawai desa. Selain itu, dari segi sumber daya penunjang, penting untuk memperhatikan fasilitas, sarana, dan prasarana sebelum kebijakan ini diimplementasikan, karena tanpa hal tersebut reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan efektif. Adapun hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Desa Buyut berasal dari kurangnya pengawasan dan sosialisasi mengenai kebijakan yang diterapkan

REFERENSI

Ahmed, K. A., Sharif, N., & Ahmad, N. (2017). Factors influencing students' career choices: Empirical evidence from business students. *Journal of Southeast Asian Research*, 1–15. https://doi.org/10.5171/2017.718849

Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona (COVID-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance, 1*(2).

Rizaldy, R. F., Adi, K., Wijaya, S., Purnamaningsih, R. P., & Purnamaningsih, E. (2024). Optimization of bureaucratic reform on service performance of Airlangga Urban Village, Gubeng Subdistrict, Surabaya City. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 2*(1). http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn

Furay, D., & Mustofa, A. (2023). Analisis reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Pendapatan Daerah. *SMIA: Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik*, (2).

Rahman, H. (2022). Reformasi birokrasi: Korupsi dalam birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2735

Ningsih, O., & Hadi, R. (2022). Optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik (Studi kasus program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga). *Social Science Studies, 2*(3), 258–273. https://doi.org/10.47153/sss23.3912022

Rohayatin, T. (2018). Strategi reformasi birokrasi pemerintahan daerah: Menuju era globalisasi. *Jurnal Transformative*. https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/22

Yusriadi, Y. (2018). Reformasi birokrasi Indonesia: Peluang dan hambatan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 8*(2), 178. https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824